

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2022 - Audited

Jl. Janti No. 66 Banguntapan

Bantul - DI Yogyakarta 55198

Telp. (0274) 520502 Fax. (0274) 581675

e-mail : jogjakarta@ptun.org



**LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022
(Audited)
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA**

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Janti No. 66 Banguntapan

Telp. (0274) 520502 Fax. (0274) 581675

Bantul - DI Yogyakarta 55198

e-mail : jogjakarta@ptun.org

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bantul, Mei 2023
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

BUDI SURYANA, S.H.
NIP.196702131988031002

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi.....	3
Pernyataan Tanggung Jawab.....	3
Ringkasan.....	7
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	10
II. Neraca.....	13
III. Laporan Operasional.....	16
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	19
V. Catatan atas Laporan Keuangan.....	21
A. Penjelasan Umum.....	21
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	30
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	34
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	43
F. Pengungkapan Penting Lainnya.....	50
VI. Daftar dan Lampiran.....	52
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap.....	54
Daftar Hibah Langsung.....	58

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

Jl. Janti No. 66 Banguntapan Bantul - DI Yogyakarta 55198
Telp. (0274) 520502 Fax. (0274) 581675 email : jogjakarta@ptun.org

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan pada 31 Desember Tahun Anggaran 2022 - Audited sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bantul, Mei 2023
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

BUDISURYANA, S.H.
NIP.196702131988031002

RINGKASAN

Ringkasan

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada 31 Desember Tahun 2022 (Audited) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 .

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember TA 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 10.169.000.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember TA 2022 adalah sebesar Rp 6.718.866.157 atau mencapai 84 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 7.998.004.000

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2022. Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp 48.760.756.818, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp 9.851.450; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 48.750.905.368; Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 152.690 dan Rp 48.760.604.128.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 10.169.000, sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp 7.157.140.496 sehingga terdapat defisit dari

Kegiatan Operasional senilai Rp 7.146.971.496, Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp 0 dan surplus sebesar Rp 0 sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar Rp 7.146.971.496.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp 48.930.932.467 dikurangi defisit-LO sebesar Rp 7.146.971.496 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 6.976.643.157 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp 48.760.604.128.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 31 Desember Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(dalam satuan Rupiah)

No	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH)	% REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH)	% REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH								
	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	0	10.169.000	10.169.000	0,00	12.444.000	10.119.120	2.324.880	81,00
	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	10.169.000	10.16	0,00	12.444.000	10.119.120	2.324.880	81,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	10.169.000	10.169.000	0,00	12.444.000	10.119.120	2.324.880	81,00
B.	BELANJA				-				

BELANJA	7.998.004.000	6.718.866.157	1.279.137.843	84,00	7.826.084.000	7.101.239.701	724.844.299	90,73
Belanja Pegawai	6.380.327.000	5.213.923.689	1.166.403.311	82,00	6.380.327.000	5.776.094.934	604.232.066	91,00
Belanja Barang	1.567.177.000	1.454.442.468	112.734.532	93,00	1.330.757.000	1.210.322.413	120.434.587	91,00
Belanja Modal	50.500.000	50.500.000	0	100,00	115.000.000	114.822.354	177.646	10,00
JUMLAH BELANJA	7.998.004.000	6.718.866.157	1.279.137.843	84,00	7.826.084.000	7.101.239.701	724.844.299	90,73
C PEMBIAYAAN				0				0

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(dalam satuan Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (penurunan)	
	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Jumlah	%
1	2	3	3	5
ASET				
Aset Lancar				
Persediaan	9.851.450	9.513.400	338.050	3.55
Jumlah Aset Lancar	9.851.450	9.513.400	338.050	3.55
Aset Tetap				
Tanah	39.517.834.000	39.517.834.000	0	0
Peralatan dan Mesin	3.777.499.060	3.461.534.310	315.964.750	9.13
Gedung dan Bangunan	10.768.175.354	10.768.175.354	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	9.710.000	9.710.000	0	0
Aset Tetap Lainnya	15.033.978	15.033.978	0	0
AKUMULASI PENYUSUTAN	(5.337.347.024)	(4.840.379.344)	(496.967.680)	10.27
Jumlah Aset Tetap	48.750.905.368	48.931.908.298	(181.002.930)	(0.37)
Aset Lainnya				
Aset tak Berwujud	100.315.000	100.315.000	0	0
Aset Lain-Lain	154.981.500	154.981.500	0	0
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(255.296.500)	(255.030.000)	(266.500)	0.10
Jumlah Aset Lainnya	0	266.500	(266.500)	(100)
Jumlah Aset	48.760.756.818	48.941.688.198	(180.931.380)	(0.37)
KEWAJIBAN				
Kewajiban Jangka Pendek				
Utang kepada Pihak Ketiga	152.690	10.755.731	(10.603.041)	(98,58)
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	152.690	10.755.731	(10.603.041)	(98,58)

	Jumlah Kewajiban	152.690	10.755.731	(10.603.041)	(98,58)
EKUITAS					
	Ekuitas	48.760.604.128	48.930.932.467	(170.328.339)	(0,35)
	Jumlah Ekuitas	48.760.604.128	48.930.932.467	(170.328.339)	(0,35)
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	48.760.756.818	48.941.688.198	(180.931.380)	(0,37)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2022 -AUDITED
(dalam satuan Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	Jumlah		Kenaikan (penurunan)	
	31 Desember 2021	31 Desember 2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5
Kegiatan Operasional				
Pendapatan				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	10.169.000	10.119.000	50.000	0,494
Jumlah Pendapatan (A)	10.169.000	10.119.000	50.000	0,494
Beban				
Beban Pegawai	5.213.923.689	5.776.094.934	(562.171.245)	(9,733)
Beban Persediaan	37.756.350	41.665.975	(3.909.625)	(9,383)
Beban Barang dan Jasa	690.149.569	651.804.309	38.345.260	5,883
Beban Pemeliharaan	624.970.989	482.166.007	142.804.982	29,617
Beban Perjalanan Dinas	90.624.469	37.801.000	52.823.469	139,741
Beban Penyusutan dan Amortisasi	499.715.430	496.842.749	2.872.681	0,578
Jumlah Beban (B)	7.157.140.496	7.486.374.974	(329.234.478)	(4,398)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional (C=A-B)	(7.146.971.496)	(7.476.255.974)	329.284.478	(4,404)
Kegiatan Non Operasional				
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	120	(120)	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	120	(120)	(100)
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL LAINNYA	0	120	(120)	(100)
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA	(7.146.971.496)	(7.476.255.854)	329.284.358	(4,404)
POS LUAR BIASA				

Beban Luar Biasa	0	0	0	0
Jumlah Pos Luar Biasa	0	0	0	0
SURPLUS/DEFISIT – LO	(7.146.971.496)	(7.476.255.854)	329.284.358	(4.404)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021	KENAIKAN/PEN URUNAN	%
1	2	3	4	5
Ekuitas Awal	48.930.932.467	49.315.877.740	(384.945.273)	-
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	(7.146.971.496)	(7.476.255.854)	329.284.358	-
Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	0	0	0	-
Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	0	0	0	-
Koreksi Lain-lain	0	0	0	-
Transaksi Antar Entitas	6.976.643.157	7.091.310.581	(114.667.424)	-
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	(170.328.339)	(384.945.273)	214.616.934	-
Ekuitas Akhir	48.760.604.128	48.930.932.467	(170.328.339)	-

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta adalah "TERWUJUDNYA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA YANG AGUNG". Visi dimaksud bermakna sebagai berikut: menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta adalah Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilakukan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.
2. Memberikan Dukungan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya sesuai visi dan misi yang telah ditentukan membuat beberapa langkah-langkah strategis yang tercakup dalam program utama 2020-2024 sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Program utama tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk beberapa kegiatan pokok, sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara baru.
2. Penyelesaian sisa perkara.
3. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
4. Penyelesaian kelengkapan berkas banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.
5. Penyampaian Pemberitahuan Pemanggilan Sidang.
6. Penyampaian Pemberitahuan Relas putusan .
7. Pelaksanaan diklat teknis non yudisial.
8. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
9. Tindak lanjut temuan yang masuk.
10. Publikasi proses penyelesaian perkara.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2022	
	DIPA ANGGARAN AWAL	DIPA ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	0	0
Penerimaan Kembali persekot/ Uang Muka Gaji	0	-
Jumlah Pendapatan	0	0
Belanja		
Belanja Pegawai	6.380.327.000	6.380.327.000
Belanja Barang	1.567.177.000	1.567.177.000
Belanja Modal	50.500.000	50.500.000
Jumlah Belanja	7.998.004.000	7.998.004.000

B.1. Pendapatan

*Realisasi
Pendapatan
Negara Rp
10.169.000*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 10.169.000. Pendapatan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berasal dari Pendapatan Sewa tanah, Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Estimasi pendapatan	Realisasi Pendapatan	%
	Pendapatan			
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	10.169.000	0,00
	Total Pendapatan	0	10.169.000	0,49

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada 31 Desember TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp. 49.880 atau (0,49) persen dibandingkan TA 2021. Hal ini

disebabkan karena; perbedaan harga sewa rumah dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang termanfaatkan .

Perbandingan realisasi PNBP TA 2022 dan 2021 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2022 dan 2021

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2022	2021	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	10.169.000	10.119.120	49.880	0,49
	Total Pendapatan	10.169.000	10.119.120	49.880	0,49

B.2. Belanja

*Realisasi
Belanja Negara
: Rp
6.718.866.157*

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta per 31 Desember TA 2022 adalah sebesar Rp. 6.718.866.157 atau sebesar 84.01% dari anggaran senilai Rp. 7.998.004.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada 31 Desember TA 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2022

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2022		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	6.380.327.000	5.213.923.689	81,72
Belanja Barang	1.567.177.000	1.454.442.468	92,81
Belanja Modal	50.500.000	50.500.000	100,00
Total Belanja	7.998.004.000	6.718.866.157	84,00

Realisasi Belanja Negara mengalami penurunan sebesar Rp. (382.373.544) atau sebesar (5,384) persen dari realisasi per 31 Desember tahun lalu. Penurunan tersebut disebabkan karena: adanya penurunan pada belanja pegawai dan belanja modal.

Perbandingan realisasi belanja 31 Desember TA 2022 dan 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2022 dan 31 Desember TA 2021

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	5.213.923.689	5.776.094.934	(562.171.245)	(9,73)
Belanja Barang	1.454.442.468	1.210.322.413	244.120.055	20,17
Belanja Modal	50.500.000	114.822.354	(64.322.354)	(56,02)
Total Belanja	6.718.866.157	7.101.239.701	(382.373.544)	(5,38)

B.2.1. Belanja Pegawai

*Realisasi
Belanja
Pegawai : Rp
5.213.923.689*

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta per 31 Desember TA 2022 dan 31 Desember TA 2021 adalah sebesar Rp. 5.213.923.689 dan Rp. 5.776.094.934.

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2022 mengalami penurunan sebesar (9,73) persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2021. Hal ini disebabkan berkurang atau mutasi keluar sejumlah pegawai/hakim yang bertugas pada PTUN Yogyakarta.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.213.923.689	5.776.094.934	(562.171.245)	(9,73)
Total Belanja	5.213.923.689	5.776.094.934	(562.171.245)	(9,73)

B.2.2. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja Barang
: Rp
1.454.442.468*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta per 31 Desember TA 2022 dan 31 Desember TA 2021 adalah sebesar Rp. 1.454.442.468 dan Rp 1.210.322.413.

Realisasi Belanja Barang 31 Desember TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 244.120.055 sebesar 20,169 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain karena : naiknya belanja perjalanan dinas dan belanja pemeliharaan pada tahun 2022.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2022 dan 31 Desember TA 2021

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Persediaan	37.756.350	55.155.000	(6.197.250)	(11,236)
Belanja Barang dan Jasa	690.149,569	650.485.706	50.266.904	7,727
Belanja Pemeliharaan	624.970,989	466.880.707	147.226.932	31,534
Belanja Perjalanan Dinas	90.624,469	37.801.000	52.823.469	139,74
Total Belanja Bruto	1.454.442.468	1.210.322.413	244.120.055	20,169

B.2.3. Belanja Modal

*Realisasi
Belanja Modal:
Rp. 50.500.000*

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021 adalah sebesar Rp. 50.500.000 dan Rp 114.822.354

Realisasi Belanja Modal TA 2022 mengalami penurunan sebesar (56,019) persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain: karena alokasi belanja modal pada TA 2022 hanya berupa belanja pc dan printer.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	50.500.000	114.822.354	(64.322.354)	(56,019)
Total Belanja Netto	50.500.000	114.822.354	(64.322.354)	(56,019)

B.2.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

*Realisasi
Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin: Rp.
50.500.000*

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 adalah sebesar Rp 50.500.000 , mengalami penurunan sebesar (56,019) persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp (64.322.254). Hal ini disebabkan di tahun anggaran 2022 ini Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta hanya mendapatkan belanja modal berupa Personal Computer dan Printer.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Komputer Unit	40.500.000	49.382.000	(17,98)
Printer	10.000.000	3.500.000	185,71
Mesin Antrian	0	27.400.000	(100,00)
Kursi Roda	0	2.300.000	(100,00)
Meja Komputer	0	1.200.000	(100,00)
Kursi Komputer	0	1.100.000	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	50.500.000	84.882.000	(40,50)
Pengembalian	0	0	0,00
JUMLAH BELANJA	50.500.000	84.882.000	(40,50)

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

*Aset Lancar: Rp
9.851.450*

Aset Lancar**C.1.Persediaan**

*Persediaan: Rp
9.851.450*

Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 9.851.450 dan Rp. 9.513.400. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 31 Desember TA 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Barang Konsumsi	9.851.450	9.513.400
	Total	9.851.450	9.513.400

*Aset Tetap: Rp
48.750.905.368*

Aset Tetap

C.2.Tanah

*Tanah:
Rp39.517.834.000
0*

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 39.517.834.000 dan Rp. 39.517.834.000.

Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Rincian Mutasi Tanah

(dalam satuan Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2021	39.517.834.000
Mutasi Tambah	
Revaluasi Aset Tetap	0
Mutasi Kurang	
...	0
Saldo per 31 Desember 2022	39.517.834.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	0

Nilai Buku 31 Desember 2022

39.517.834.000

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Tanah TA 2022*(dalam satuan Rupiah)*

No.	Luas (m ²)	Lokasi	Nilai
1	5.896	Pilahan, Wonocatur dan Janti	39.517.834.000
Jumlah			39.517.834.000

C.3.Peralatan dan Mesin*Peralatan dan
Mesin : Rp
3.777.499.060*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 3.777.349.060 dan Rp. 3.461.534.310.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin*(dalam satuan Rupiah)*

Saldo per 31 Desember 2021	3.461.534.310
Mutasi Tambah	
Pembelian	50.500.000
Transfer Masuk	285.314.750
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar	17.368.750
Penyusutan	2.481.250
Saldo per 31 Desember 2022	3.777.499.060

Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	(3.421.424.371)
Nilai Buku 31 Desember 2022	358.555.939

Mutasi tambah peralatan dan mesin pada 31 Desember Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 50.500.000 yang diperoleh dari belanja modal pembelian 3 (tiga) buah Personal Computer dan 2 (dua) Printer dan Transfer Masuk dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung sebesar Rp 285.314.750 berupa peralatan sidang online.

Mutasi Kurang adalah Transfer Keluar sebesar Rp 19.850.000 berupa mesin scanner yang dalam neraca tercatat: Transfer keluar sebesar Rp 17.368.750 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp 2.481.250.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusunannya per 31 Desember 2022 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.4. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp
10.768.175.354*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 10.768.175.354 dan Rp. 10.768.175.354.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Gedung dan Bangunan

(dalam satuan Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2021	10.768.175.354
Mutasi Tambah	
Penambahan	0
Mutasi Kurang	
...	0
Saldo per 31 Desember 2022	10.768.175.354

Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	(1.906.212.653)
Nilai Buku 31 Desember 2022	8.861.962.701

Nilai Aset Tetap berupa gedung dan Bangunan tidak mengalami perubahan dari akhir Juni TA 2022 dengan yang tersaji pada Neraca dari Nilai Aset tetap berupa gedung dan bangunan pada Desember TA 2021.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.5.Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp
9.710.000*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.9.710.000 dan Rp. 9.710.000.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam satuan Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2021	9.710.000
Mutasi Tambah	
...	0
Mutasi Kurang	
...	0
Saldo per 31 Desember 2022	9.710.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	(9.710.000)
Nilai Buku 31 Desember 2022	0

Nilai Aset Tetap berupa Jaringan tidak mengalami perubahan dari akhir Desember 2021 hingga 31 Desember TA 2022

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.6. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp
15.033.978*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 15.033.978 dan Rp. 15.033.978.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Rincian Aset Tetap Lainnya

(dalam satuan Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2021	15.033.978
Mutasi Tambah	
TM dari MA RI	0
Mutasi Kurang	
...	...
Saldo per 31 Desember 2022	15.033.978
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	0
Nilai Buku 31 Desember 2022	15.033.978

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : Rp
[5.337.347.024]*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp (5.337.347.024) dan Rp (4.840.379.344) .

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2022 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	3.777.349.060	3,421,424,371	358.555.939
2	Gedung dan Bangunan	10.768.175.354	1.906.212.653	8.861.962.701
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	9.710.000	9.710.000	0
4	Aset Tetap Lainnya	15.033.978	0	15.033.978
	Jumlah	14.570.268.392	5.337.347.024	9.235.552.618

Aset Lainnya: Rp
0

Aset Lainnya

C.8.Aset tak berwujud

Aset tak Berwujud :
Rp 100.315.000

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 100.315.000 dan Rp. 100.315.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Adapun mutasi transaksi ATB per 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak Berwujud

(dalam satuan Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2021	100.315.000
----------------------------	-------------

Mutasi Tambah	
...	0
Mutasi Kurang	
...	0
Saldo per 31 Desember 2022	100.315.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	(100.315.00)
Nilai Buku 31 Desember 2022	0

Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Tidak terdapat mutasi untuk aset tidak berwujud selama hingga akhir Desember TA 2022.

C.9.Aset Lain-lain

*Aset Lain-lain :
Rp 154.981.500*

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 154.981.500 dan Rp. 154.981.500. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Rincian Aset Lain-Lain

(dalam satuan Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2021	154.981.500
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2022	154.981.500

C.10. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
lainnya : Rp
(255.296.500)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp (255.296.500) dan Rp. (255.030.000) Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2022	TA 2021
1	Aset tak Berwujud	100.315.000	100.315.000
2	Aset Lain-lain	154.981.500	154.981.500
	Nilai perolehan Aset Lainnya	255.296.500	255.296.500
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(255.296.500)	(255.030.000)
	Nilai buku Aset Lainnya	0	266.500

Kewajiban Jangka Pendek

C.11. Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada
Pihak Ketiga:
Rp 152.690*

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 152.690 dan Rp. 10.755.731. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.	Beban Belanja Penggunaan Telepon Bulan Desember 2022	152.690	(Akrual)
Jumlah		152.690	

EKUITAS

C.12. Ekuitas

*Cadangan
Piutang:
Rp
48.760.604.128*

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 48.760.604.128 dan Rp 48.930.932.467.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan
Pnp : Rp
10.169.000*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp 10.169.000 dan Rp 10.119.000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2022 dan 31 Desember TA 2021

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021	Naik(turun)%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	10.169.000	10.119.000	0,494
Total Pendapatan		10.169.000	10.119.000	0.494

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai
: Rp
5.213.923.689

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 5.213.923.689 dan Rp 5.776.094.934. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021	Naik(turun)%
1.	Beban Gaji Pokok PNS	2,226,685,600	2,308,077,980	(3,526)
2.	Beban Pembulatan Gaji PNS	30,981	33,038	(6,226)
3.	BebanTunj. Suami/Istri PNS	162,155,730	169,635,010	(4,409)
4.	Beban Tunj. Anak PNS	45,837,932	46,586,672	(1,607)
5.	Beban Tunj. Struktural PNS	40,320,000	36,540,000	10,344
6.	Beban Tunj. Fungsional PNS	1,990,310,000	2,392,060,000	(16,795)
7.	Beban Tunj. PPh PNS	241,661,726	289,258,774	(16,454)
8.	Beban Tunj. Beras PNS	117,030,720	120,434,460	(2,826)
9.	Beban Uang Makan	364,081,000	381,554,000	(4,579)
10.	Beban Tunj. Umum PNS	25,810,000	31,915,000	(19,128)
	Total	5,213,923,689	5,776,094,934	(9,732)

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan : Rp
37.756.350*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 30 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 37.756.350 dan Rp 41.665.975. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2022 dan 31 Desember TA 2021

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021	Naik(turun)%
1.	Beban Persediaan Konsumsi	37.756.350	41.665.975	(9.383)
	Total	37.756.350	41.665.975	(9.383)

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Jasa : Rp
690.149.569*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 690.149.569 dan Rp 651.804.309. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas yang di tahun 2022 mengalami kenaikan. Kenaikan nilai Beban barang dan jasa karena kenaikan harga atas beban operasional perkantoran, kenaikan belanja jasa pos dan giro, kenaikan beban langganan listrik serta langganan telepon.

Rincian Beban Barang dan jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang Jasa per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun) %
Beban Keperluan perkantoran	453.869.750	345.088,100	31,522
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.116.700	3,034,900	35,645
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	46.728.000	50,514,000	(7,494)
Beban Barang Operasional Lainnya	13.465.025	46,760,300	(71,204)
Beban Bahan	1.335.000	6,034,600	(77,877)
Beban Barang Operasional- Penanganan Pandemi Covid 19	487.500	7,921,500	(93,845)
Beban Langganan Listrik	122.422.661	115,533,688	5,962
Beban Langganan Telpon	2.009.933	1,953,221	2,903
Beban Sewa	41.380.000	66,420,000	(37,699)
Beban Jasa – Penanganan Pandemi COVID-19	4.335.000	8,344,000	(48,046)
Beban Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19	0	200,000	(100,00)
Total Beban Barang dan Jasa	690.149.569	651.804.309	5,883

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp 624.970.989*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 624.970.989 dan Rp 482.166.007. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Peningkatan nilai beban pemeliharaan disebabkan karena naiknya beban pemeliharaan Gedung dan Bangunan demi mensukseskan program Zona Integritas.

Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	367.897.171	203.355.009	80,913
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	109.017.311	109.456.265	(0,401)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	137.193.157	154.069.433	(10,953)
Beban Persediaan untuk bahan Pemeliharaan	10.863.350	15.285.300	(28,929)
Total Beban Pemeliharaan	624.970.989	482.166.007	29,617

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas : Rp
90.624.469*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 90.624.469 dan Rp 37.801.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas dikarenakan banyak kegiatan dinas sudah dilakukan secara luring.

Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)%
Beban Perjalanan Biasa	89.724.469	35,851,000	150,27
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	900,000	1,950,000	53,846
Total Beban Perjalanan Dinas	90.624.469	37.801.000	139,74

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan
dan Amortisasi*
: Rp
499.715.430

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 499.715.430 dan Rp 496.842.749. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	168.848.602	165.709.423	1.89
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	330.600.328	330.600.326	0
Beban Penyusutan Aset lain-lain	266.500	533.000	(50,00)
Jumlah Amortisasi			0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	499.715.430	496.842.749	(0,578)

D.8. Surplus /(Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya

*Surplus defisit
dari Kegiatan
Non
Operasional
Lainnya :Rp 0*

Surplus /(Defisit) Kegiatan Non Operasional diperoleh dari selisih Surplus/ (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar, Surplus/ (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya.

Rincian Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional lainnya
Per 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)%
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	120	(100)
Total Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	120	(100)

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal
Rp 48.932.467*

Nilai ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 dan 01 Januari 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 48.930.932.467 dan Rp 49.315.877.740.

E.2. Surplus (defisit) LO

*Defisit LO Rp
7.146.971.496*

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp (7.146.971.496) dan Rp (7.476.255.854). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Transaksi Antar Entitas

*Transaksi Antar
Entitas Rp
6.976.643.157*

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 6.976.643.157 dan Rp 7.091.310.581.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

**Rincian Transaksi Antar Entitas
Per 31 Desember 2022
(dalam satuan Rupiah)**

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(10.169.000)
Ditagihkan ke Entitas Lain	6.718.866.157
Transfer Masuk	285.314.750
Transfer Keluar	(17.368.750)
Jumlah	6.976.643.157

E.3.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2022, DDEL sebesar Rp (10.169.000) sedangkan DKEL sebesar Rp 6.718.866.157.

E.3.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lainnya pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp 0

No	Entitas Asal	Jenis	Nilai
1	Badan Urusan Administrasi	Paket Peralatan sidang online	285.314.750
Jumlah			285.314.750

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 17.368.750 yang merupakan pengembalian barang ke Badan Urusan Administrasi.

E.4. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 48.760.604.128 dan Rp 48.930.932.467.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Pada Bulan November 2022 dilakukan Penilaian PIPK. Hasil penilaian merekomendasikan bahwa belanja pompa pendorong seharga Rp 798.000 dan roll kabel sepanjang 50 m senilai Rp 465.000 menghasilkan aset ekstrakomptabel. Temuan ini ditindaklanjuti dalam penjelasan CaLK ini, karena transaksi telah terjadi di Bulan Agustus dan di dalam 1 SPM tidak hanya memuat kwitansi pompa pendorong dan roll kabel maka tidak memungkinkan dilakukan ralat SPM.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Terdapat temuan pada Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa Transfer Masuk/Transfer Keluar (TK/TM) berupa scanner, server dan laptop yang sudah tercatat pada Laporan Keuangan TA 2022 unaudited, dengan rekomendasi untuk dilakukan koreksi agar pencatatannya kembali ke Badan Urusan Administrasi (BUA). Pengadilan Tata Usaha Negara termasuk dalam list koreksi berupa Transfer Masuk BMN berupa Scanner.

Tindak lanjut atas temuan tersebut sudah dilaksanakan dengan melakukan koreksi pencatatan berupa Transfer Keluar Scanner kembali ke Badan Urusan Administrasi (BUA).

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Informasi Belanja Akrual hingga akhir 31 Desember TA 2022

No.	Uraian	Nilai
1.	Beban Belanja Penggunaan Telepon Bulan Desember 2022	Rp 152.690
Jumlah		Rp 152.690

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta adalah:

1. BRI KC Jakarta Veteran V/C 651555788021000 a.n. BPG 030 PTUN YOGYAKARTA 05 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILMILTUN dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp.0.
2. BRI KC Jakarta Veteran V/C 651555788011000 a.n. BPG 030 PTUN YOGYAKARTA 01 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0
3. BRI Yogyakarta Katamso A/C 00000245-01-001579-30-7 a.n. RPL 030 PTUN Yogyakarta yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember sebesar Rp. 2.525.000

F.2.4. Revisi DIPA

Informasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 07 April 2022 Revisi I DIPA 01 tentang pemutakhiran POK dan hal III DIPA rencana penarikan ;
2. Revisi DIPA II tertanggal 08 Juli 2022, pemutakhiran POK serta hal III rencana penarikan.
3. Revisi DIPA III tertanggal 07 Oktober 2022, pemutakhiran POK serta Rencana Penarikan Hal III DIPA.
4. Revisi DIPA IV tertanggal 18 November 2022, pemutakhiran POK serta Rencana Penarikan Hal III DIPA.

F.2.5. Catatan Penting Lainnya

Hingga akhir Bulan Desember TA 2022 tidak ada perubahan pada pejabat pengelola keuangan.

F.2.6. Pemanfaatan Belanja Akun Covid

Informasi mengenai pemanfaatan anggaran belanja dalam rangka Covid-19 dapat kami sampaikan sebagai berikut:

Kode	Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisai	Realisasi	%	Sisa Anggaran
521131	Belanja Barang Operasional- penanganan Pandemi Covid 19	4,200,000	1,500,000	487,500	32.5	1,012,500
522192	Belanja Jasa-Penanganan Pandemi Covid 19	14,800,000	6,300,000	4,335,000	68.81	1,965,000
	Jumlah	19,000,000	7,800,000	4,822,500	61.83	2,977,500

Seiring dengan semakin melandainya Pandemi Covid 19 maka regulasi/ketentuan makin dilonggarkan oleh pemerintah, sehingga kebijakan diambil untuk merevisi anggaran penanganan Pandemi Covid untuk menaikkan tingkat penyerapan. Anggaran Penanganan Pandemi Covid 19 setelah revisi menjadi Rp 7.800.000. Realisasi anggaran yang mampu terserap hingga akhir Bulan Desember 2022 sebesar Rp 4.822.500 atau sebesar 61,83% dari total anggaran sebesar Rp 7.800.000.

DAFTAR DAN LAMPIRAN

*RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN,
DAN NILAI BUKU ASET
TETAP*

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap

untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2022

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Total Penyusutan S.D.	Nilai Buku
				Per 31 Desember 2021	Periode Ini Per 31 Desember 2022	Periode ini Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2022
A.	Peralatan dan Mesin		3.811.160.210	(3.265.022.019)	(169.233.217)	(3.434.255.236)	182.578.374
	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	872.409.941	(872.409.941)	0	(872.409.941)	0
	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	-		0	-	-
	Alat Ukur	5	-		0	-	-
	Alat Pengolahan	4	-		0	-	-
	Alat Kantor	5	494.679.240	(454.392.956)	(23.846.284)	(478.239.240)	16.440.000
	Alat Rumah Tangga	5	929.378.244	(861.377.012)	(23.657.239)	(885.034.251)	44.343.993
	Alat Studio	5	138.303.820	(80.646.000)	(7.063.582)	(87.709.582)	50.594.238
	Alat Komunikasi	5	37.143.000	(37.143.000)	0	(37.143.000)	0
	Peralatan Pemancar	10	11.475.000	(11.475.000)	0	(11.475.000)	0
	Alat Kedokteran	5	2.395.000	(555.000)	(460.000)	(1.015.000)	1.380.000

	Unit Alat Laboratorium	8	-		0	-	-
	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/elektronika	15	-		0	-	-
	Komputer Unit	4	1.313.055.965	(934.703.110)	(114.206.112)	(1.048.909.222)	264.146.743
	Peralatan Komputer	4	12.320.000	(12.320.000)	13.459.573	(12.320.000)	-
B.	Gedung dan Bangunan		10.768.175.354	(1.575.612.325)	(330.600.328)	(1.906.212.653)	8.861.962.701
	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	8.195.388.354	(1.204.334.731)	(248.094.195)	(1.452.428.926)	6.742.959.428
	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	2.479.689.000	(359.954.865)	(79.989.971)	(439.944.836)	2.039.744.164
	Tugu/tanda Batas	50	93.098.000	(11.322.729)	(2.516.162)	(13.838.891)	79.259.109
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		9.710.000	(9.710.000)	0	(9.710.000)	0
	Instalasi Lain	5	9.710.000	(9.710.000)	0	(9.710.000)	0
D.	Aset Tetap Lainnya		15.033.978	0	0	0	15.033.978
	Bahan Perpustakaan Tercetak	-	15.033.978,	0	0	-	15.033.978
	Software	5	100.315.000	(100.315.000)	0	(100.315.000)	0
	Aset Tak Berwujud	5	100.315.000	(100.315.000)	0	(100.315.000)	0
F.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan		155.181.500.000	(154.915.000.000)	(266.500.000)	(155.181.500.000)	0
	Alat Ukur	5	-		0	-	-
	Alat Kantor	5	-		0	-	-
	Alat Rumah Tangga	5	15.209.500.000	(14.943.000)	(266.500)	(15.209.500)	0
	Komputer Unit	4	139.772.000	(139.772.000)	0	0	0

Alat Komunikasi	1	200.000	(200.000)	0	(200.000)	0
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		54.367.700.04	(4.995.549.344)	(500.100.045)	(5.495.649.389)	48.857.016.675
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya		54.367.700.042	(4.995.549.344)	(500.100.045)	(5.495.649.389)	48.857.016.675

Daftar Hibah Langsung

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2022

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
				NIHIL			
Jumlah :							